

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi Di Desa Meristim Distrik Moskona Utara)

Oleh : LUKAS OROCOMNA

Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan demokratisasi masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti pertama sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; kedua sebagai program dan ketiga sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan catatan statistik diketahui bahwa hampir 80% penduduk di Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset pembangunan, apabila dikembangkan dan diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Otonomi Daerah seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah di harapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di desa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki arti bahwa desa mampu berinisiatif atau berkreatifitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, dan tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki arti bahwa :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus. Pemberdayaan masyarakat antara lain dilakukan melalui demokratisasi masyarakat. Demokratisasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Keberhasilan otonomi di desa di satu pihak membutuhkan tingkat demokratisasi dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Di lain pihak, proses otonomi dapat memberikan kesempatan berdemokratisasi dalam menempatkan kekuatan dan

sumber daya menjadi lebih dekat, dan lebih jelas, sehingga mudah diatur oleh pemerintahan desa. Dalam lingkungan dimana budaya demokratisasi masyarakat sangat rendah, otonomi dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kesempatan yang bersifat rutin dan teratur bagi interaksi masyarakat.

Dalam memberdayakan masyarakat desa, selain dilakukan reorientasi peran pemerintah pusat, juga secara sistematis dan konsisten melakukan penyadaran terhadap masyarakat desa melalui isu-isu lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Upaya yang dilakukan lebih bersifat partisipatoris sehingga mampu menumbuhkan kemampuan masyarakat lokal. Strategi lain adalah melakukan tekanan secara politik terhadap institusi-institusi lokal seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif khususnya yang menyangkut fungsional kinerja mereka. Tekanan ini dimaksudkan untuk mendorong perbaikan-perbaikan pada kinerja institusi-institusi formal tersebut agar mampu merespon, merencanakan serta melaksanakan aspirasi-aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat.

Demokratisasi yang mengarah pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ini mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat, pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat desa yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai “pengetahuan lokal” untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Bertitik tolak pada sejauh mana masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, terutama di desa Mersitim, Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian yang berjudul : Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Meristim).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berusaha merumuskan masalah yang ingin diteliti agar tidak menyulitkan dalam pengumpulan data yang diperlukan. Maka dari itu penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa Meristim?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka penelitian yang dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu pemerintahan, dan terkhusus membahas masalah “Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Meristim)”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa Meristim.

D. Manfaat penelitian

- a. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Meristim.
- b. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut partisipasi dalam demokratisasi pelaksanaan pembangunan desa Meristim
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai suatu acuan bagi pemerintah desa dalam penetapan kebijakan untuk meningkatkan pembangunan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Demokratisasi

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan. Para pelopor yang telah berjasa mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi antara lain : John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) dan JJ.Rousseau (1712-1770) dengan teorinya masing-masing.

Menurut Abraham Lincoln, Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, dalam

perkembangan demokrasi dewasa ini dapat kita peroleh gambaran sebagai berikut :

- a. Yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih, dimana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan oleh wakil rakyat dalam melaksanakan kekuasaan negara.
- b. Cara melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat.
- c. Kekuasaan negara demokrasi yang boleh dilaksanakan mungkin untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat asal tidak menyimpang dari dasar-dasar pokok demokrasi.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

B. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu satuan sosial dari sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Istilah inggrisnya adalah society, sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab Syakara yang berarti ikut serta atau demokratisasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah ilmiahnya berinteraksi. Ada beberapa pengertian masyarakat :

Menurut Selo Sumarjan (1974), masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Menurut Koentjaraningrat (1994) , masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

Menurut Ralph Linton (1968) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial.

Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia

tersebut.

C. Pengertian Pembangunan

Hakekat dari suatu pembangunan adalah perubahan secara terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang diinginkan. Proses dimulainya pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Berikut beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang arti pembangunan, antara lain :

Ginanjar Kartasmita, secara sederhana mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Sedangkan Sondang P Siagian, mendefenisikan pembangunan sebagai :

“Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Defenisi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik daripada yang sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

Selanjutnya Menurut Wrihatnolo, pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum.

Brata dalam bukunya “Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa” mengemukakan arti pembangunan adalah :

“Pembangunan desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang demokratisasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa Meristem.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah demokratisasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Meristim. Yang dimaksud dengan demokratisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah Partisipasi anggota masyarakat desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik di desa, mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, sampai evaluasi pembangunan. Dalam penelitian ini, peneliti mengfokuskan pada pembangunan fisik infrastruktur Jalan desa dan tani di desa Meristim dengan Indikator yang digunakan adalah :

- Partisipasi dalam bentuk Ide atau Pikiran,
- Partisipasi dalam bentuk Tenaga,
- Partisipasi dalam bentuk Uang/materi,
- Partisipasi dalam Mengevaluasi hasil pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam hal ini adalah hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, baik itu berupa penghambat (faktor penghambat) maupun yang mendukung partisipasi ini (faktor pendukung). Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung
 - Faktor kesadaran masyarakat
 - Tingkat pendidikan masyarakat
 - Peran pemerintah desa dalam mengarahkan masyarakat
 - Kesempatan atau peluang masyarakat
2. Faktor Penghambat
 - Fasilitas atau peralatan
 - Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan (library Study), sedangkan data primer adalah data yang bersumber dari studi lapang (Field Research).

Studi lapang yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informan dan informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

b. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan lang-

sung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku, makalah-makalah hasil penelitian serta berbagai sumber lain.

D. Informan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Informan penelitian ini adalah :

- Pemerintah desa
- Tokoh masyarakat desa
- Kalangan pendidik , sebanyak 5 orang
- Kalangan agama, sebanyak 4 orang
- Warga desa Meristim

E. Teknik Analisis data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini.. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Meristim

Proses pembangunan dan pengembangan masyarakat, terutama pembangunan desa sesungguhnya dapat dimulai secara sederhana, yaitu sesuai dengan kebutuhan, kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat secara alamiah mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya. Oleh karena itu setiap upaya pembangunan harus mempertimbangkan potensi lokal dan dinamika masyarakat.

Pembangunan bisa dikatakan berhasil apabila mampu mengubah cara berpikir, menggali kesadaran baru, membebaskan diri dari berbagai sistem yang menjerat dan yang lebih utama lagi dapat menemukan kembali rasa percaya diri. Selama ini banyak program pembangunan yang bersifat top-down atau blue-print berambisi membuat kegiatan besar dan mahal yang disusun dan dirancang, tanpa menden-

garkan dan menggali aspirasi masyarakat sehingga inisiatif masyarakat kurang berkembang dan tidak adanya rasa memiliki oleh masyarakat itu terhadap hasil pembangunan. Banyak sekali hasil pembangunan yang tak terurus dan terlantar karena tidak adanya kepedulian dari masyarakat untuk merawat karena segi manfaat yang rendah.

Penyertaan masyarakat dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, program bahkan sampai pada pemantauan kegiatan akan menumbuhkan penyadaran individu akan pentingnya keikutsertaan dalam proses pembangunan dan akan menghilangkan apatisisme pembangunan. Menggali informasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki untuk menentukan skala prioritas secara bersama menghasilkan sasaran pembangunan yang tepat.

Partisipasi masyarakat dalam demokratisasi pembangunan dapat berupa, Partisipasi dalam bentuk ide, Partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang/materi dan partisipasi dalam bentuk mengevaluasi hasil pembangunan. Berikut dapat dilihat penjelasan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam demokratisasi pembangunan di desa Meristim yaitu:

1. Partisipasi Dalam Bentuk Ide atau Pikiran

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak terbatas pada pelaksanaan program, tetapi juga dalam menyumbang ide/pikiran serta proses pengambilan keputusan dan pemilihan program yang akan dilaksanakan. Kebijaksanaan semacam itu memungkinkan masyarakat secara luas berpartisipasi dalam pelaksanaannya, juga dapat mendatangkan sisi positif yang lain.

Sisi positif yang lain tersebut adalah tersalurkan aspirasi serta kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta terbinanya kreativitas dan inisiatif warga masyarakat untuk ikut menentukan suatu program pembangunan yang bermanfaat.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dalam pelaksanaannya terkhusus di desa Meristim dilakukan dengan pertemuan formal dan Informal antara masyarakat dan pemerintah desa dalam membahas dan mencari solusi dan menentukan kebijakan.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Kepala Urusan Pembangunan desa Meristim, mengatakan bahwa :

“Banyak masyarakat sering menyumbangkan ide dalam pembangunan apalagi dipancing membahas suatu masalah yang mendesak di desa Meristim, itupun tidak dalam bentuk rapat di kantor desa. Kebanyakan di saat waktu senggang, misalnya di Pos Kamling pada malam hari”.

Pengembangan partisipasi ide/pikiran, dikaji dalam dua penyaluran aspirasi yang dilakukan yaitu dalam bentuk formal dimana dilakukan dalam rapat-rapat desa atau pertemuan formal lainnya. Berhubung tidak semua masyarakat ikut dalam rapat desa maka pemerintah setempat melakukan pendekatan dalam bentuk informal yaitu pertemuan diluar forum formal dengan aparat pemerintah desa dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa guna menyerap semua aspirasi dari masyarakat demi pengembangan dan pembangunan desa yang berkesinambungan.

Berdasarkan Wawancara dengan kepala desa Meristim mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pertemuan formal (rapat desa) tidak semua elemen masyarakat diundang dalam mengikuti rapat desa, yang diundang hanya Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Anggota BPD dan Perwakilan masyarakat”.

Sependapat dengan Kepala Desa, Ibu AM selaku Anggota BPD Meristim sekaligus tokoh Agama mengatakan bahwa :

“Memang seluruh warga tidak di Undang, dengan pertimbangan masyarakat mempunyai kesibukan masing-masing. Kalau dalam penyampaian aspirasi, bisa melalui ketua kami di jajaran BPD atau perwakilan masyarakat, nanti perwakilan masyarakat atau kami yang sampaikan dalam suatu Rapat Desa”.

Sesuai dengan penjelasan kepala desa Meristim, tidak ada larangan bagi masyarakat untuk ikut dalam rapat. Asumsi bahwa hanya beberapa elemen yang diundang didasarkan bahwa tokoh masyarakat, kepala dusun, anggota BPD dan perwakilan masyarakat adalah karena mereka sebagai perwakilan masyarakat desa itu, disamping karena mereka memiliki kemampuan untuk menghimpun, menyerap dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

2. Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga

Partisipasi dalam bentuk tenaga dalam hal ini diwujudkan lewat keikutsertaan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Mereka menyumbangkan tenaga untuk pembangunan seperti ikut serta membuat jalan, membuat jembatan, membangun rumah dan yang lainnya secara ikhlas tanpa upah. Bahkan tak jarang demi keikutsertaannya mereka rela untuk tidak pergi ke sawah atau ke kebun. Hal ini di kemukakan Tokoh Masyarakat, bahwa :

“Kalo memang tenaga saya dibutuhkan, dan jika tidak ada pekerjaan yang mendesak, saya akan ikut berpartisipasi dalam pembangunan sesuai yang diamanahkan pemerintah desa Meristim”.

Bentuk partisipasi semacam ini merupakan bentuk partisipasi yang paling tinggi. Kontribusi mereka lewat sumbangan tenaga dalam hal ini juga bisa dikatakan sebagai aspek dominan dalam keberhasilan pembangunan. Umumnya mereka semuanya ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tanpa kecuali. Secara teknis sumbangan tenaga demikian ini biasanya dilakukan secara gradual ataupun terjadwal sehingga tidak ada satupun anggota masyarakat yang tertinggal dalam menyumbangkan tenaganya. Hal ini diungkapkan oleh kepala dusun Meristim, dalam wawancara di rumahnya mengatakan bahwa :

“Kita di dusun, memang sudah mengatur jadwal kerja bakti untuk pembangunan fasilitas umum khususnya jalan desa yang melintasi dusun Meristim. Kita ambil hari sabtu pagi sesuai kesepakatan warga dengan mempertimbangkan waktu yang diambil adalah waktu yang luang sehingga masyarakat bisa turun langsung ikut berpartisipasi”.

Jika saja usul ataupun tidak bisa menyumbangkan tenaganya, biasanya masyarakat memberikan ganti rugi yang berwujud pemberian makan ataupun uang sesuai dengan kesepakatan yang ada, seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, yang berkumpul bersama-sama untuk membuat kue dan minuman untuk masyarakat yang ikut melaksanakan pembangunan. Hal ini di kemukakan oleh tokoh masyarakat, ibu AS, mengatakan bahwa :

“Untuk kaum ibu-ibu, kita janji kumpul dimana dan patungan untuk beli bahan kue, minuman yang akan dihidangkan nantinya. Dan lalu kita buat bersama-sama. Sehingga secara tak langsung kita juga terlibat dalam partisipasi tenaga”.

Hal ini juga di kemukakan kepala dusun di lokasi pembuatan jalan desa mengatakan bahwa:

“Memang kalo masyarakat disini, bisa dikatakan kompak kalau ada kerja bakti, gotong royong atau semacamnya, utamanya fasilitas umum seperti Jalan desa yang akan kita kerjakan ini. Masyarakat akan terjun langsung dengan kita selalu memberi pemahaman bahwa fasilitas umum ini, kita semua yang akan memakainya.”

3. Partisipasi Dalam Bentuk Uang Atau Materi

Dari sisi partisipasi yang lain, adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan bentuk uang ataupun material (bahan bangunan). Selama ini dana-dana pembangunan yang ada adalah secara swadaya dan APBD. Sedangkan untuk partisipasi dalam wujud bahan material, adalah dilakukan oleh orang-orang yang notabene adalah yang berkemampuan cukup dalam segi finansial, seperti perangkat desa ataupun orang-orang yang dipandang kaya

dalam masyarakat desa setempat. Mereka umumnya dimintai atau dengan suka rela menyumbangkan material bahan bangunan.

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Desa, mengatakan :

“Kita dari pemerintah desa, memang tidak paksakan sumbangan berupa uang, apalagi dari segi penghasilan masyarakat Meristim kurang mendukung, karena umumnya masyarakat disini adalah petani”.

Sesepakat dengan sekretaris desa, tokoh masyarakat yang juga Petani Sayuran di desa Meristim, AD bahwa :

“Sangat jarang kita menyumbang dalam bentuk uang secara langsung, apalagi diantara kami kebanyakan petani saja, akhir akhir ini juga, Kolu dan sayuran yang ditanam turun harganya”.

4. Partisipasi Dalam Bentuk Mengevaluasi Hasil Pembangunan

Bentuk partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan merupakan sesuatu yang penting, dimana masyarakat dapat melihat bagaimana hasil dari pembangunan itu sendiri, sesuai atau tidak dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Hasil dari evaluasi ini diharapkan sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam menentukan pembangunan selanjutnya.

Tetapi terkadang selama ini, sering terjadi discommunication antara pemerintah dengan masyarakat tentang berbagai informasi pembangunan yang ada, sehingga yang terjadi adalah pemerintah tidak mengerti dengan kondisi dan keinginan masyarakat, begitu pula sebaliknya, masyarakat juga tidak mengerti betul apa sebetulnya kemauan pemerintah. Kondisi seperti ini bisa terjadi karena selama ini komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat desa adalah cenderung berlangsung satu arah. Dampak dari pola komunikasi semacam ini masih terjadi hingga sekarang (Rogers: 1982; Alwi Dahlan: 1980; Rondinelli: 1985). Kondisi ini sesuai dengan yang ungkapkan oleh masyarakat setempat, AR dalam kutipan wawancara mengatakan :

”Kita sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan, tapi kadang lokasi yang kita inginkan tidak sesuai dengan lokasi yang kita harapkan. Mau diapalagi, kalau pembangunan sudah terlanjur terlaksana, dari pada tidak ada sama sekali, lebih baik kita syukuri saja apa yang ada”.

Kurangnya animo masyarakat desa dalam mengevaluasi hasil pembangunan bukan merupakan indikator pada pencapaian demokratisasi pembangunan tetapi wadah untuk menampung aspirasi

masyarakat kepada pemerintah. Salah satu penyebab lain adalah kesibukan dari masyarakat, apalagi pelaksanaan pertemuan evaluasi sering kali dilaksanakan masa waktu kerja. Hal ini diungkapkan oleh Kepala urusan pemerintahan desa Meristim, mengatakan bahwa :

“Memang masyarakat disini, kurang perhatiannya untuk ikut rapat evaluasi pembangunan, mereka hanya tau bahwa sudah dilaksanakan pembangunan, setelah itu selesai dan digunakan tanpa memperhatikan tahap evaluasi”.

Dengan faktor-faktor tersebut, mengakibatkan kurangnya animo untuk mengikuti rapat evaluasi dalam setiap pembangunan serta masih acuh dan tak acuhnya masyarakat untuk mengevaluasi suatu pembangunan

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa Meristim dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang meliputi :
 - a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau pikiran, dalam penyaluran aspirasi yang dilakukan kebanyakan pemerintah setempat melakukan pendekatan dalam bentuk informal yaitu pertemuan di luar forum formal dengan aparat pemerintah desa dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pengambilan kebijakan ditingkat desa guna menyerap semua aspirasi dari masyarakat guna pengembangan dan pembangunan desa yang berkesinambungan.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, umumnya mereka semuanya ikut terlibat partisipasi bentuk tenaga ini di dalam pelaksanaan pembangunan tanpa kecuali. Secara teknis sumbangan tenaga ini biasanya dilakukan secara gradual ataupun terjadwal sehingga tidak ada satupun anggota masyarakat yang tertinggal dalam menyumbangkan tenaganya. Bentuk partisipasi dalam bentuk tenaga ini adalah merupakan bentuk partisipasi yang paling tinggi.
 - c. Partisipasi dalam bentuk uang atau materi, partisipasi dalam bentuk uang atau materi ini dipengaruhi pada tingkat pendapatan. Informan yang kebanyakan petani dengan penghasilan di bawah Rp.500.000 ini menjawab ”jarang” ataupun ”tidak pernah” beralasan yaitu memiliki keuangan yang

tidak memungkinkan untuk disumbangkan. dan memiliki kebutuhan hidup yang mesti dipenuhi.

- d. Partisipasi dalam bentuk mengevaluasi hasil pembangunan, yang menjadi indikator utama alasan informan mengatakan tidak pernah adalah kesibukan dari masyarakat, apalagi pelaksanaan pertemuan evaluasi sering kali dilaksanakan masa waktu kerja. Dengan kurangnya pertemuan antara pemerintah desa Meristim dengan masyarakat desa Meristim, mengakibatkan sering terjadi discommunication antara pemerintah dengan masyarakat tentang berbagai informasi pembangunan yang ada. Inilah yang membuat pemerintah tidak mengerti dengan kondisi dan keinginan masyarakat, begitu pula sebaliknya.

B. Saran

1. Penguatan demokratisasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa Meristim harus lebih dioptimalkan dengan mengupayakan berbagai cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi di desa Meristim, dimana guna mewujudkan cita-cita pembangunan yakni tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat desa Meristim.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan, antara lain : (a) Kesadaran masyarakat dengan menjamin partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut akan memberikan hasil positif bagi pembangunan desa. (b) Tingkat pendidikan masyarakat dalam hal ini dapat dilakukan dengan memberi dorongan dan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. (c) Pengarahan pemerintah yaitu pemberian motivasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, diikuti dengan tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri (d) Kesempatan atau peluang, hal ini mengidentifikasi masyarakat perlu dilibatkan dalam partisipasi pembangunan di desa, agar tercipta kesadaran untuk menjaga serta dan merawat hasil pembangunan. (e) Ketersediaan fasilitas atau peralatan, dimana agar masyarakat mempunyai keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan

desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatah, Eep Saefulloh, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994.
- Fuady, Munir, Konsep Negara Demokrasi. Refika aditama, Bandung. 2010.
- Lane, Jan-lane, Demokratisasi dan Pertumbuhan, Rajagrafindo persada, 2002.
- Dahl, A Robert, Perihal Demokrasi. Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 2011.
- Faried, Ali, Studi tentang Kebijakan Pemerintahan. Makassar. 2011.
- Abipraja Soedjono. Perencanaan Pembangunan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.
- Brata, I Nyoman, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Coralie Bryant, Lousie G White., Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1987.
- Daldjoeni N, Suyitno A, Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan, Alumni, Bandung 1985.
- Direktur Jenderal Pembangunan Desa. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa. Penebar Swadaya, Jakarta, 1996.
- Hagul, Peter, Pembangunan Desa dan Lembaga Sosial Di Pedesaan, Cetakan I, CV.Rajawali, Jakarta 1985.
- Koentjaraningrat., Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan, PT Gramedia Utama, Jakarta 2002.
- Maskun, Sumitro, Pembangunan Masyarakat Desa, Media Widya Mandala, Yogyakarta 1993.
- Ndraha, Talidzuhu, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), PT. Asdi Mahasatya, Jakarta 2003.
- Madani, Muhlis, Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik, Graha Ilmu, Jakarta, 2011.
- Prasadja, Buddy, Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinan, CV Rajawali, jakarta 1980.
- Sjahrir dan Korten, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Soetomo, Pembagunan Masyarakat (Beberapa Tinjauan Pustaka), Liberty Yogyakarta, 1990.
- Sumaryadi Nyoman. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta, 2005.
- Usman, Sunyoto. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Widjaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, jakarta 2007.
- Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003.
- Widjaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, jakarta 2007.
- , Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh, PT Raja Grafindo Persada, jakarta 2005.
- , Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, PT Raja Grfindo Persada, Jakarta 2002.
- , Pemerintahan Desa/Marga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

DOKUMEN DAN SUMBER LAINNYA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah.